



LINTAS MENTAOK

Kemenkumham Dampingi Pemkot Jogja

UMBULHARJO—Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan pendampingan kepada Pemkot Jogja mengenai pengukuran indeks kualitas kebijakan Kemenkumham 2023. Terkait dengan Permenkumham No.22/2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Tim Pendamping Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kemenkumham, Amin Salasa mengatakan kedatangannya dalam rangka pendampingan pengukuran Permenkumham No.22/2021. Akan ada penilaian kriteria kabupaten atau kota peduli HAM.

"Ini kami pendampingan, pengukuran penilaian setiap tahun tetapi bukan di kami, di Direktorat Jenderal HAM, kami sebatas pendampingan," katanya di Kantor Wali Kota Jogja, Selasa (4/4).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Agus Tri Haryono menyampaikan Pemkot akan berupaya melakukan pemenuhan layanan publik yang inklusif atau nondiskriminatif. Pemberian layanan akses kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan warga miskin.

(nis)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005